

KELENGKAPAN DATA INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) TA 2025, TAHUN UKUR 2026





DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Wewenang
1.	Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang terdiri dari: 1. Kode Urusan 2. Urusan 3. Kode Program 4. Program 5. Keterangan (Perangkat Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
		Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang terdiri dari: 1. Kode Urusan 2. Urusan 3. Kode Program 4. Program 5. Perangkat Daerah 6. Pagu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
		Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUAPPAS) Perubahan yang terdiri dari: 1. Kode Urusan 2. Urusan 3. Kode Program 4. Program 5. Perangkat Daerah 6. Pagu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
		Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang terdiri dari: 1. Kode Urusan 2. Urusan 3. Kode Program 4. Program 5. Perangkat Daerah 6. Pagu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan (Tambahan)	Wewenang
1.	Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah pada Dokumen RKPD atau Dokumen KEM Regional, Dokumen KUAPPAS Hasil Penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan Dokumen KUAPPAS yang telah disahkan oleh Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari: 1. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Target Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3. Target Rasio Gini 4. Target Indeks Modal Manusia (IMM) 5. Target Tingkat Kemiskinan (%) 6. Target Penurunan Emisi GRK (%)	Setda, Bappeda, BPKAD, dan OPD yang Membidangi Masing-Masing
		Dokumen Renja OPD, Renstra OPD, RKPD, KUAPPAS dan yang terdiri dari: 1. Program Prioritas Nasional 2. Program Prioritas Daerah 3. Kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung Prioritas Nasional 4. Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung Prioritas Nasional 5. Target Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung Prioritas Nasional	
		Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD atau Laporan Evaluasi RKPD, yang terdiri dari: 1. Capaian Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung Prioritas Nasional	



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Wewenang
2.	Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Alokasi Anggaran Belanja Untuk Fungsi Pendidikan yang terdiri dari: 1. Kode Sub Kegiatan 2. Uraian Sub Kegiatan 3. Anggaran per Sub Kegiatan 4. Total Belanja Daerah dalam APBD <i>*Dihitung pada saat Menyusun APBD terkait mandatory spending (data yang digunakan adalah APBD Perubahan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
		Alokasi Anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: 1. Belanja Pegawai 2. Tunjangan Profesi Guru 3. Tunjangan Khusus Guru 4. Tambahan Penghasilan Guru 5. Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya 6. Total Belanja Daerah dalam APBD <i>*Dihitung pada saat Menyusun APBD terkait mandatory spending (data yang digunakan adalah APBD Perubahan)</i>	



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Wewenang
2.	Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Alokasi Anggaran Belanja Untuk Infrastruktur yang terdiri dari: 1. Kode Sub Kegiatan 2. Uraian Sub Kegiatan 3. Anggaran per Sub Kegiatan 4. Total Belanja Daerah dalam APBD <i>*Dihitung pada saat Menyusun APBD terkait mandatory spending (data yang digunakan adalah APBD Perubahan)</i>	Bappeda, Biro Pemerintahan Setda, BPKAD, dan Perangkat Daerah yang menangani SPM
		Alokasi Anggaran Belanja Untuk Memenuhi SPM yang terdiri dari: 1. Perhitungan pemenuhan kebutuhan, (ada di laporan SPM atau di rencana penyusunan anggaran pelayanan dasar di rpjmd/rkpd/renstra/renja) 2. Pengalokasian anggaran, (ada di laporan SPM di bagian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yg nilai rupiah target atau yg alokasi di APBD) 3. Target, (output bisa berupa %, orang, kegiatan, bukan berupa nilai rupiah, ada di laporan SPM di bagian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yg nilai target output atau di LPPD) 4. Capaian, (output bisa berupa %, orang, kegiatan, bukan berupa nilai rupiah, ada di laporan SPM di bagian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yg nilai realisasi output atau di LPPD) <i>*Terdapat dalam Laporan SPM atau RPJMD/RKPD/RENSTRA/RENJA atau dalam LPPD</i>	



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan (Tambahan)	Wewenang
2.	Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Dokumen Alokasi Belanja Wajib yang Didanai Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Persentase Dan Penggunaannya Telah Ditentukan (<i>Earmark</i>) atau Alokasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari: 1. Realisasi Hasil Penerimaan menurut Objek Pajak Daerah 2. Alokasi <i>Earmark</i> dalam APBD 3. Persentase <i>Earmark</i> *Data APBD Perubahan	BPKAD, Bappenda



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Sumber Dokumen	Wewenang
3.	Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 3)	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BAPPEDA	Dinas Kominfo (Publikasi ke Website Utama Pemda dan Menginput Data Pada Aplikasi IPKD) *Pada web utama pemda ditampilkan tanggal unggah dokumen, preview dokumen, dan dokumen dapat didownload
		2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BAPPEDA	
		3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BAPPEDA	
		4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BPKAD	
		5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BPKAD	
		6. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BPKAD	
		7. Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Dokumen murni/induk	BPKAD	
		8. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BPKAD	
		9. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) jika ada perubahan maka menggunakan dokumen perubahan paling akhir	BPKAD	
		10.Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.	BPKAD	
		11. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.	BPKAD	
		12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP).	SETDA	
		13. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	BPKAD	
		14.Opini Badan Pemeriksa Keuangan	BPKAD/INSPEKTORAT	
		15.Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	SETDA	
		16.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	BPKAD	
		17. Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Daerah	Bappeda atau BPKAD	
		18. Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional		
		19. Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak daerah	BPKAD	



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Wewenang
4.	Dimensi Penyerapan Anggaran (Dimensi 4)	Peyerapan Anggaran Belanja Operasional yang terdiri dari: 1. Anggaran 2. Realisasi *Terdapat pada LRA dalam LKPD Hasil Audit BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
		Peyerapan Anggaran Belanja Modal yang terdiri dari: 1. Anggaran 2. Realisasi *Terdapat pada LRA dalam LKPD Hasil Audit BPK	
		Peyerapan Anggaran Belanja Transfer yang terdiri dari: 1. Anggaran 2. Realisasi *Terdapat pada LRA dalam LKPD Hasil Audit BPK	



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Wewenang
4.	Dimensi Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah (Dimensi 4)	Dokumen Kinerja Renstra Perangkat Daerah Per Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD atau Laporan Evaluasi RKPD yang terdiri dari: 1. Pagu per program 2. Realisasi per program 3. Target <i>Outcome</i> per indikator program 4. Capaian <i>Outcome</i> per indikator program	Perangkat Daerah yang Membidangi Masing-Masing Urusan Pemerintahan Daerah dan Sekretariat Daerah



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Wewenang
5.	Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	Data yang bersumber dari LRA pada LKPD Hasil Audit BPK : 1. Total PAD (realisasi) 2. Total Pendapatan (realisasi) 3. Pendapatan DAK (realisasi) 4. Belanja Pegawai (realisasi) 5. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota (realisasi)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappenda
		Data yang bersumber dari Neraca pada LKPD Hasil Audit BPK : 1. Total Kewajiban 2. Kas dan Setara Kas (penjumlahan seluruh kas di daerah dan setara kas) 3. Investasi Jangka Pendek 4. Kewajiban Jangka Pendek 5. Kewajiban Jangka Panjang 6. Total Aset Tetap	
		Data yang bersumber dari LO pada LKPD Hasil Audit BPK : 1. Total Pendapatan 2. DAK LO 3. Total Beban	
		Data yang bersumber dari Rincian Dana Transfer Umum (DTU): 1. DAU yang telah ditentukan penggunaannya yaitu DAU untuk gaji p3k, kelurahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (realisasi)	
		Data yang bersumber dari Hasil Penerimaan Pajak : 1. Pajak Air Tanah *khusus untuk Kab/Kota 2. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik *khusus untuk Kab/Kota 3. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor *khusus untuk Kab/Kota 4. Pajak Rokok *Provinsi dan Kab/Kota 5. Pajak Kendaraan Bermotor *khusus untuk Provinsi	
		UNTUK KAB/KOTA → Pada masing-masing penerimaan pajak tersebut dihitung realisasi atas alokasi belanja wajibnya , kemudian dijumlahkan dan diinputkan ke dalam IPKD.	
		UNTUK PROVINSI → Pada masing-masing penerimaan pajak tersebut dihitung realisasi atas alokasi belanja wajibnya , kemudian dijumlahkan dan diinputkan ke dalam IPKD.	
		Data yang bersumber dari Rincian Belanja Bantuan Keuangan pada CaLK LKPD Hasil Audit BPK : 1. ADD yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa (realisasi)	



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

No	Dimensi	Data yang Diperlukan	Wewenang
6.	Dimensi Opini BPK (Dimensi 6)	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menyatakan Opini BPK apakah WTP atau WDP atau Disclaimer: 1. Dokumen Opini BPK TA 2024 2. Dokumen Opini BPK TA 2023 (jika tahun sebelumnya sudah pernah mengupload, maka tahun ini sudah tidak perlu upload Kembali) 3. Dokumen Opini BPK TA 2024 2022 (jika tahun sebelumnya sudah pernah mengupload, maka tahun ini sudah tidak perlu upload Kembali)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Inspektorat Daerah



DATA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGUKURAN IPKD TA 2025, TAHUN UKUR 2026

== Surat Pernyataan berttd Sekda, yang menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang diinput pada dimensi 1 s.d. dimensi 6 dalam aplikasi IPKD benar, sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan ==



TERIMA KASIH